BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja alima yang artinya "mengerti atau mengetahui". Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' *alim*, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf, nahwu, balagah* dan sebagainya.[1]

Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah

[1] Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.[2]

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mufassir salaf (Sahabat dan Tabiin) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang dimaksud dengan Ulama, diantaranya:

1. Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Swt. Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama.
2. Hasan Basri berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
3. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
4. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.
5. Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Qur'an (yang mendalami maknanya) sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat

[2] Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 1945" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Karena itu mereka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.

6. Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa Ulama adalah orang – orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluri, Ulama adalah orang – orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.[3]

Peran Ulama merupakan pewaris para nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siapa mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama adalah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan-Nya, dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim makan keagungan dan ketinggian kekuasaan-Nya. Rasulullah menerangkan kemuliaan Ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya.[4] Ulama pewaris para Nabi yang harus kita hormati bukanlah sembarang Ulama, yang dimaksud dengan Ulama adalah orang yang

---

[3] Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45-56.

[4]Adnan Hasan Shalih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, terj. Mas'uruliyatul Abilmuslimi Fi Tarbiyatil Waladi Marhalati Aththufurulah, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berilmu, dan dengan ilmunya itu ia menjadi amat takut kepada Allah SWT. Sehingga, ia bukanlah orang yang durhaka.[5]

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah sebabnya Ulama sering menampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariaannnya tidak dapat dipisahkan dari peran Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.[6]

B. Fungsi Ulama

Ulama merupakan pengalih fungsi ke-Nabi-an. Setiap Ulama harus mampu mengemban misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Umat menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keihklasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan nilai – nilai keislaman dalam kehidupan sehari – hari. Tanggung Jawab Ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran pengalaman ajarannya.[7]

---

[5] Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Ber-Angka* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 341.
[6] Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003), 13.
[7] Hsubky, *Dilema Ulama*, 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat Islam telah memahami pengertian jihad dan perjuangan para rasul Allah beserta segenap pengikut mereka didalam menegakkannya. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa kewajiban jihad tidak terlepas dari upaya penyebaran Islam dan mempertahankan kesatuan umat. Pada hakikatnya, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat dipisahkan dari jihad. Karena banyaknya kendala dan risiko yang harus dihadapi setiap penegaknya, bahwa jiwanya pun menjadi taruhan.[8]

Bagi umat Islam Jihad merupakan ajaran yang sangat penting, baik dalam pengalaman, pengembangan, maupun pelestarian agamanya. Namun jika dilihat dari aspek sejarah, jihad dalam arti perang diperintahkan Allah Swt kepada Rasulullah Saw dan umat Islam hanyalah dalam upaya menghadapi perlakuan dan serangan yang menyakitkan seperti terror, intimidasi, ejekan, penganiayaan fisik, dan serangan terorganisir. Pada masa awal Islam, jihad justru dilakukan dengan berdakwah. Baru pada masa Madinah, di samping jihad dalam bentuk dakwah, jihad dalam bentuk perang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam.[9] Beberapa kewajiban Ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:

1. Menegakkan dakwah dan membentuk kader Ulama:
   a. Menanamkan akidah Islam dalam membebaskan semua manusia dari segala macam kemusrikan.
   b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku – suku terasing diseluruh pelosok pedesaan.

---

[8] Hsubky, *Dilema Ulama*, 48.

[9] Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad Paling Syar'I* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.

d. Membentuk kader – kader penerus Ulama demi eksistensi perjuangan dakwa Islam.

2. Mengkaji dan mengembangkan Islam.

a. Mengkaji nilai –nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma', dan Qiyas.

b. Mencari Gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Melindungi Islam dan umatnya

a. Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.

b. Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan masuk Islam.

c. Memupuk rasa persatuan di antara umat Islam bila timbul perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.

Dengan demikian, hendaklah Ulama giat mengatasi berbagai persoalan sosial yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyrikan.[10]

Ain Najaf, dalam Qiyadatul Ulama Wal Ummah menyebutkan enam tugas ulama:

1. Tugas Intelektual, ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat menegmbangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis – majelis ilmu, pesantren, atau lewat menyusun kitab-ktab yang

[10] Husbky, *Dilema Ulama*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh, ilmu-ilmu Aqliah, dan lain – lain.

2. Tugas bimbingan keagamaan, ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram, ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum – hukum Islam.
3. Tugas komunikasi dengan umat, ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh berpisah dengan membentuk kelas elit. Akses pada umatnya diperoleh melalui hubungan langsung, mengirim wakil kesetiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khotbah.
4. Tugas menegakkan syi'ar Islam, ia harus memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagia manifestasi ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun Masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya, menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan merevitalisasikan maknanya dalam kehidupan akhlak dan dengan menghidupkan sunah Rasulullah SAW, sambil menghilangkan *bid'ah – bid'ah jahiliyah.*
5. Tugas mempertahankan hak–hak umat, ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak–hak mereka dirampas, ia harus berjuang meringankan penderitaan mereka dan membebaskan belenggu – belenggu yang memasung kebebasan mereka.
6. Tugas berjuang melawan musuh Islam dan Mukminin, Ulama adalah Mujahidin yang siap menhadapi lawan-lawan islam, bukan saja dengan pena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ibadah, tetapi dengan tangan dan dada. Mereka selalu mencari *syahadah* sebagai kesaksian dan komitmennya yang total terhadap Islam,[11]

Peranan Ulama dalam kehidupan masyarakat beragama dalam memimpin dan membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis di kalangan masyarakat memang sangatlah menarik, demi terciptanya manusia yang utuh dan memberi kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, keberadaan manusia yang akan dibangun terdiri atas unsur jasmaniah dan rohaniah. Pentingnya keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan adalah dalam aspek pembangunan unsur rohaniahnya. Unsur ini mustahil dapat terisi tanpa keterlibatan para pemimpin agama. Dengan demikian, keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan tidak bersifat suplementar (pelengkap penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya bahkan pemimpin agama dapat berperan lebih luas, bukan hanya terbatas pada pembangunan rohani masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, dan pemberi landasan etis dan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan.[12] Berikut merupakan peran pemimpin agama dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Pemimpin Agama Sebagai Motivator

Dengan keterampilan dan kharisma yang dimilikinya, para pemimpin agama telah berperan aktif dalam mendorong suksesnya kegiatan-kegiatan

[11] Moch. Eksan, *Kiai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 10-11.
[12] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan. Dalam pandangan para pemimpin agama, kegiatan pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Terlibatnya para pemimpin agama dalam kancah kegiatan pembangunan ini, terutama didorong oleh kesadaran untuk ikut secara aktif memikirkan permasalahan – permasalah duniawi yang sangat kompleks yang dihadapi umat manusia. Begitu komleksnya masalah yang dihadapi umat manusia didunia ini sampai pemerintahan sekuler tidak dapat lagi memecahkannya tanpa bantuan dari pihak pemimpin agama, seperti pemberantas kemiskinan, mengatasi kesenjangan, mencegah kerusakan lingkungan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melihat kenyataan seperti itu, tentu para pemimpin agama tidak dapat diam berpangku tangan dengan mengatakan bahwa agama tidak mengurusi permasalahan umat yang bersifat fisik. Agama hanya mengurusi aspek spritiual dari kehidupan manusia.

Para pemimpin agama dapat memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu giat berusaha. Jangan sekali – kali mengajari masyarakat bahwa takdir dapat diyakini sebagai alasan untuk bersifat fatalis. Para pemimpin agama seyogianya memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa takdir hanyalah batas terakhir dari upaya manusia dalam meraih prestasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, para pemimpin agama telah mampu membuktikan kemampuannya untuk berbicara secara rasional dan tetap membangkitkan gairah serta aksi masyarakat dalam meraih sesuatu yang dicita – citakannya.[13]

[13]Kahmad, *Sosiologi Agama*, 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemimpin Agama Sebagai Pembimbing Moral

Peran kedua yang dimainkan para pemimpin agama di masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan adalah peran yang berkaitan dengan upaya – upaya menanamkan prinsip – prinsip etik dan moral masyarakat. Dalam kenyataannya, kegiatan pembangunan umumnya selalu menuntut peran aktif para pemimpin agama dalam meletakkan landasan moral, etis, dan spiritual serta peningkatan pengamalan agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan agar memperoleh kesejatiannya dengan berpijak dengan landasan etis dan moral. Berangkat dari landasan etis dan moral inilah, kegiatan pembangunan lalu diarahkan pada upaya pemulihan harkat dan martabat manusia, harga diri dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang atau kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya. Disinilah kemudian nilai – nilai religious yang ditananmkan para pemimpin agama memainkan peranan penting dalam kegiatan pembangunan.

Dalam kegiatan ini, lalu para pemimpin agama, dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya, memberikan tuntunan dan patokan sebagai rambu – rambu dalam mengaktualisasikan kegiatan pembangunan. Tuntutan dan patokan yang tertuang dalam kitab suci, teladan para nabi, dan hukum – hukum agama yang merupakan elaborasi dari sabda Tuhan menurut hasil pemikiran para pemuka, pemimpin, dan pemikir agama pada masa lalu, mereka jadikan bahan untuk membimbing arah kegiatan pembangunan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh. Malah bukan hanya itu saja, kepribadian religious yang dimiliki para pemimpin agama, seperti sifat adil, jujur, taat ajaran, dan selalu bersikap tawakal kepada Tuhan, juga merupakan alat yang cukup ampuh dalam membimbing aktivitas masyarakat yang sedang membangun.[14]

Sifat – sifat para pemimpin agama diatas, biasanya sangat dikagumi dan tentu berulangkali ditiru oleh masyarakat, sikap jujur terhadap orang lain tanpa menghiraukan status sosial dan kedudukannya, ajaran tentang arti penting efesiensi dalam menjalani kehidupan, hidup secara sederhana, tidak berlebih – lebihan, senantiasa bersikap tawakal, dan selalu mengabdi kepada Tuhan. Sebagaian contoh kecil sifat – sifat yang diadopsi masyarakat dari para pemimpin agamanya. Selain itu, para pemimpin agama juga senantiasa mengajari masyarakat untuk tidak congkak kepada sesama, dan memperlakukan semua orang dengan cara – cara yang tidak mengarah kepada sikap – sikap yang diskriminatif.

3. Pemimpin Agama Sebagai Mediator

Peran lain para pemimpin agama yang tidak kalah pentingnya, juga dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan di masyarakat adalah sebagai wakil masyarakat dan sebagai pengantar dalam menjalin kerja sama yang harmonis di antara banyak pihak dalam rangka melindungi kepentingan – kepentingannya di masyarakat dan lembaga – lembaga keagamaan yang dipimpinnya. Untuk membela kepentingan – kepentingan tersebut, para pemimpin agama biasanya memposisikan diri sebagai mediator diantara

[14]Kahmad, *Sosiologi Agama* , 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pihak di masyarakat, seperti antara masyarakat dengan elite penguasa dan antara masyarakat miskin dengan kelompok orang – orang kaya. Melalui para pemimpin agama, para elite penguasa dapat memahami apa yang diinginkan masyarakat, dan sebaliknya elite penguasa dapat mensosialisasikan program – programnya kepada masyarakat luas melalui bantuan para pemimpin agama, sehingga di antara keduanya terjadi saling pengertian.[15]

Peran dan fungsi ulama dilihat dari sisi strategis keberadaan Ulama di kalangan masyarakat dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Swt. dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah. Dalam konteks saat ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah istinbâth (penggalian), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw.

[15] Kahmad, *Sosiologi Agama*, 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pembimbing, pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya; melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga, pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh syaikhul Islam mengenai bolehnya kaum Muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat, sumber ilmu. Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat; mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.[16]

Peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan, hanya saja fungsi dan peran ulama telah dilemahkan oleh system demokrasi-sekular, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

Ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan ketidak berdayaan ulama. *Pertama*, kurangnya kesadaran ideologis-politis pada diri mereka. Kebanyakan ulama sekarang ini hanya fakih dalam masalah fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keIslaman yang lain; namun visi politis-ideologisnya amat lemah. Akibatnya, mereka sangat gampang dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh politikus sekular. *Kedua*, depolitisasi peran ulama. Dalam sistem pemerintahan demokratik-sekular, adanya depolitisasi ulama merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, agama tidak boleh turut campur dalam urusan negara dan publik. Akibatnya, figur ulama tidak lagi memiliki

[16] Kahmad, *Sosiologi Agama*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran politis di level masyarakat dan negara. Ulama tidak lagi memiliki akses yang luas untuk berbicara agama di ranah masyarakat dan negara. Ironisnya lagi, masyarakat umum telah terlanjur beranggapan, bahwa agama harus steril dari masalah politik dan negara. Agama harus dibersihkan dan dijauhkan dari politik dan pengaturan urusan publik. Akibatnya, ulama tidak lagi memiliki peran signifikan di dalam masyarakat dan negara, terutama untuk mempengaruhi kebijakan dan aturan-aturan publilk. Kalaupun masih ada pengaruh, yang tersisa hanyalah keberadaan dirinya sebagai tokoh spiritual belaka. *Ketiga*, ada upaya sengaja yang ditujukan untuk memarginalisasi peran ulama dari ranah politik dan negara. Cara kaum sekular untuk memarginalisasi peran ulama di sini cukup banyak, di antaranya adalah menutup akses ulama yang menyerukan diterapkannya syariah Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kaum kafir sekular juga berusaha dengan serius membunuh karakter para ulama ideologis dengan berbagai propaganda hitam. Semua ini dilakukan agar umat menjauhi ulama ideologis-politis. *Keempat*, kaum sekular juga berusaha keras memecah-belah kesatuan dan kesatuan para ulama, melalui isu khilafiyyah, perbedaan mazhab, Sunni-dan Syiah, dan lain sebagainya. Di negeri ini, pemunculan istilah "ulama khos" dan "ulama kampung" disinyalir oleh sebagian kalangan juga berpotensi memecah-belah. Untuk itu, para ulama harus menyerukan kesatuan dan persatuan kaum Muslim seraya mengajak umat untuk menyibukkan diri persoalan yang lebih penting, yakni menerapkan kembali syariah Islam.[17]

[17] Fathiy Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy "Menguatkan Peran dan Fungsi Ulama,"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Istilah Lain dari Ulama

Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat sebagai pandangan kata Ulama. Beberapa di antaranya adalah Kiai, Ulil Albab, dan Cendekiawan Muslim. Nama – nama tersebut mengandung makna penghormatan kepada seseorang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi dibidang agama. Makna istilah tersebut dapat dijelaska sebagai berikut:

1. Kiai merupakan gelar pemberian sesama manusia. Gelar Kiai bukan gelar seperti Ulama, Wali, dan Nabi. Gelar ini pun terbatas pemakaiannya pada beberapa daerah di Indonesia. Di Jawa Barat masyarakat menamakannya ajengan atau ustad. Pada umumnya, gelar Kiai ini diberikan kepada orang yang mengajar santri di pesantren[18] atau orang yang mengerti agama dan mengajarkan ilmunya.

   Posisi Kiai yang amat istimewa itu juga tidak lepas dari tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat santri, khususnya di pedesaan, yang beranggapan bahwa beragama, seseorang harus mengikuti apa yang telah diwariskan kaum Ulama tersebut. Akibatnya, tradisi ini tidak saja menjadi sumber pengikut emosi reigius dari kalangan bawah, tetapi juga terhadap kalangan menengah. Keharusan menempatkan Kiai dalam posisi yang amat istimewa tidak hanya datang dari masyarakat, melainkan juga mendapat

---

http://gemapembebasan-unhas.blogspot.com/2014/01/menguatkan-peran-dan-fungsi-ulama.html (24 April 2015).

[18] Hsubky, *Dilema Ulama,* 59 – 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legitimasi dari ajaran Islam yang mengatakan bahwa Ulama berperan sebagai pewaris Nabi.[19]

2. Ulil Albab, gelar ini merupakan panggilan Allah SWT bagi setiap orang yang berdzikir dan berpikir tentang segala ciptaan-Nya, baik di langit maupun dibumi. Dzikir dan kegiatan berpikir ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Cendekiawan Muslim, pengertian kata ini perlu dibedakan dengan *Islamic Scienctist.* Yang pertama adalah seorang muslim yang menguasai salah satu bidang ilmu, seperti atom, nuklir, kedokteran, sejarah, psikologi, dan sosiologi. Dalam bahasa Ingrist disebut *Muslim Scholar*. Yang kedua adalah sarjana non muslim yang mendalami ilmu keislaman seperti Snouk Hurgronce, Kriemer, dan Smith.

Hanya seseorang cendekiawan muslim yang memenuhi kriteria Ulama atau Ulil Albab. Cendekiawan muslim tidak dengan sendirinya Ulama, namun Ulama dengan sendirinya Cendekiawan Muslim. Kata ulama memiliki arti lebih umum dari pada kata yang lain. Selain harus memiliki ciri khas baginya, seseorang Ulama harus memenuhi kriteria Kiai, Ulil Albab, dan cendekiawan. Dengan menggunakan kaidah ilmu logika, ulama bisa disebut Kiai, cendekiawan, atau lainnya, namun selain mereka tidak bisa disebut Ulama. Umat Islam hendaknya jeli melihat siapa yang dapat disebut Ulama

[19] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik, membaca Citra Kiai* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan siapa yang bukan, demikian pula dengan Kiai. Figur Ulama tidak hanya ditentukan oleh aspek keilmuan, tetapi juga kualitas amal sehari – hari.[20]

Kajian dari pengertian terkait Ulama yang dimaksud adalah berbagai tokoh agama, dimana masyarakat memandangnya sebagai sosok yang taat dan bertauhid yang memiliki nilai – nilai keilmuan agama yang tinggi, memiliki kharisma dan mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat yang dipercaya sebagai penengah dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan mereka mampu menggerakkan pemikiran masyarakat untuk kepentingan tertentu demi menstabilkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

D. Teori Struktural-Fungsionalisme (AGIL)

Teori fungsionalisme muncul pertama kali tahun 1930-an. Teori ini muncul sebagai respon sekaligus kritik terhadap teori evolusi. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Meskipun teori Mertons dan Parsons tidak disentuhkan secara langsung dengan tema perubahan sosial dan pembangunan, namun beberapa konsep yang ada didalamnya, seperti *human capital theory* dan teori modernisasi sangat berkaitan erat dengannya. Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai bagian (agama, pendidikan, struktur politik, keluarga dan lainnya), yang saling berkaitan. Interelasi atau hubungan setiap bagian ini, berdasarkan persetujuan umum dan pola normatif, terus menerus mencari *equilibrium* (keseimbangan) dan harmoni antara mereka dan berhasil.

[20] Hsubky, *Dilema Ulama*, 62-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan yang terjadi pada suatu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan pada bagian lain, dalam garis keseimbangan dan keteraturan. Oleh karena demikian, maka dalam amatan teori fungsionalisme, konflik dalam bentuk apapun harus dihindari, sebab ia dianggap sebagai akibat dari tidak berjalannya integrasi sosial dan juga keseimbangan di dalam masyarakat. Karena pandangannya inilah maka teori fungsionalisme di anggap konservatif, yang menginginkan situasi harmoni, integrasi, stabil, dan mapan dalam segala gerak perubahan. Semua situasi ini dipandangan sebagai fungsional yang paling bernilai tinggi, karena dalam teori fungsionalisme bisa dikatakan menafikan realitas sosial lain, bahwa di dalam masyarakat ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh mekanisme dan proses yang berjalan dari sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat.[21] Dalam alam perubahan masyarakat, hanya pegangan hidup dapat menolong manusia untuk mengatasi persoalan zamannya. Bagaimanapun juga agama merupakan landasan pokok untuk hidup, karena pada saat-saat sukar dan hidup, manusia memerlukan Tuhan agar tidak mengalami kekacauan. Peranan lembaga-lembaga agama dalam membantu Negara dalam menolong warganya menjadi orang-orang yang tidak hanyut dalam perubahan masyarakat, akan tetapi menjadi orang sadar, karena mempunyai pegangan hidup.[22] Maka dari itu, agama memiliki fungsi bagi kehidupan manusia sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas dalam masyarakat beragama.

---

[21] Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 132-133

[22] Astrid S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Soial* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons dilahirkan diColorado Springs, Colorado, USA pada 13 Desember 1902 dan meninggal pada 8 Mei 1979 di Munich, Jerman pada usia 76 tahun.[23]Dia adalah seorang sosiolog yang cukup terkenal dengan pemikiran-pemikirannya. Parsons lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang sholeh dan intelek. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja kongregasional,seorang profesor dan presiden dari sebuah kampus kecil. Pada tahun 1920 ia masuk ke *Amherts College* dan mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1924. Setelah itu ia melanjutkan studi pasca sarjanannya di *London School of Economics*. Pada tahun 1925, pasrsons pindah ke Heidelberg, Jerman. Di kota ini, ia ikut serta pertemuan-pertemuan yang didirikan oleh Max Weber yang wafat lima tahun sebelum kedatangannya. Parsons sangat dipengaruhi oleh karya Weberdan sebagian desertasi doktornya membahas karya Weber. Pada tahun 1927 ia menjadi instruktur dalam ekonomi di Amherts. Parsons menjadi pengajar di Harvard pada tahun 1927, dan meskipun ia pindah jurusan beberapa kali, Parsons tetap berada di Harvard sampai dengan ia wafat pada tahun 1979. Perjalanan kariernya tidak pesat. Ia tidak memperoleh posisi tetap sampai dengan tahun 1939. Dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 1937, ia mempublikasikan sebuah buku sebagai dasar teori-teorinya, yaitu buku *The Structure of Social Action.* Satu buku yang tidak hanya memperkenalkan teoritisi-teoritisi sosial utama semisal Weber kepada sosiolog lain. Sesudah itu karier akademis

[23] Ritzer, George & J. Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi, (*Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 254-255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parsons maju pesat. Sejak tahun 1944, ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard, Amerika Serikat. Pada tahun 1946, ia menjadi ketua jurusan hubungan sosial di universitas tersebut, yang tidak hanya memasukkan sosiolog, tetapi juga berbagai sarjana ilmu sosiolog lainnya. Pada tahun 1949, ia dipilih sebagai presiden Assosiasi Sosiologi Amerika. Dan pada tahun 1951 ia menjadi tokoh dominan sosiologi Amerika seiring dengan terbitnya buku karyanya *The Social System*. Pada akhir 1960-an, Parsons mendapat serangan oleh sayap radikal sosiologi Amerika yang baru muncul, karena ia dipandang konservatif (dalam sikap politik maupun teori-teorinya). Selain itu, teori-teorinya dipandang hanya sebagai skema kategorisasi panjang lebar yang rumit.

Pada tahun 1980-an teori-teorinya diminati di seluruh dunia. Menurut Holton dan Turner (1986), karya-karya Parsons memberikan kontribusi lebih besar bagi teori sosiologi, dari pada Mark, Weber, maupun Durkheim. Selain itu, ide-ide pemikiran Parsons maupun teori-teorinya, tidak hanya mempengaruhi para pemikir konservatif namun juga teoretisi Neo-Marxian (khususnya Jurgen Habermas). Setelah kematian Parsons, sejumlah bekas mahasiswanya, semuanya sosiolog sangat terkenal, merenungkan arti penting teorinya maupun pencipta teori itu sendiri. Robert Merton adalah salah satu mahasiswanya ketika Parsons baru saja mulai mengajar di Harvard.[24]

[24]Fatmasari, "Ilmu dan Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Talcott Parsons", http://fatmasati713.worpress.com/2012/11/25/ilmu-dan-paradigma-ilmu-ilmu-sosial-talcott-porsons/, (21 Agustus 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Struktur-Fungsional (AGIL)

Tarcott parsons menyusun teori yang mampu menjelaskan hubungan antara kebudayaan, kepribadian, dan struktur sosial sekaligus memperkenalkan fungsionalisme sebagai paradigma berpikir. Bisa dikatakan bahwa ditengah kekeringan analisis sosial-budaya di paro pertama abad ke-20, Parsons menawarkan sebuah renungan yaitu model tindakan sosial manusia yang bersifat sukarela.[25]

Talcott Parsons, dalam melakukan analisis sistem masyarakat, memperkenalkan adanya subsistem dari sistem umum tindakan manusia, yaitu organisme, personalitas, sistem sosial, dan sistem kultural. Keempat sistem tindakan manusia itu dilihat sebagai susunan mekanis yang saling berkaitan dan menunjukkan tata urutan yang bersifat sibernetik, yang masing-masing memiliki fungsi. Organisme memiliki fungsi adaptasi, personalitas berfungsi untuk pencapaian tujuan, sistem sosial memiliki fungsi intergasi, dan sistem kultural berperan sebagai fungsi latensi untuk mempertahankan norma dan pola kehidupan.[26] Talcott Parsons memulai teorinya dengan empat fungsi tersebut yang disebut dengan teori AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency). Fungsi tersebut merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu dan kebutuhan sistem.

---

[25] Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 11

[26] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem tindakan diperkenalkan Parsons dengan skema AGIL-nya yang terkenal.[27] Parsons meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memeninuhi empat criteria ini. Sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Kesatuan antara bagian itu pada umumya mempunyai tujuan tertentu. Dengan kata lain, bagian-bagian itu membentuk satu kesatuan (sistem) demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu.

a. Sistem organisme biologis (aspek bilogis manusia sebagai satu sistem), dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
b. Sistem kepribadian, melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
c. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu.
d. Sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu.

Sedangkan defenisi sistem-sistem di atas menurut Talcott Parsons adalah sebagai berikut:

---

[27] Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik (Dari Comte Hingga Parsons)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sistem organisme atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Hal lain yang termasuk ke dalam aspek fisik ini ialah lingkungan fisik di mana manusia itu hidup.
b. Sistem kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini ialah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
c. Sistem sosial. Sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi itu tidak terbatas antara individu-individu melainkan juga terdapat antara kelompok-kelompok, institusi-institusi, masyarakat-masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional. Sistem sosial selalu terarah kepada equilibrium (keseimbangan).
d. Sistem budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar adalah kepercayaan religius, bahasa, dan nilai-nilai.

Kemudian dijabarkan menjadi empat komponen skema tindakan berupa, 1). Pelaku atau aktor: aktor atau pelaku ini dapat terdiri dari seorang individu atau suatu koletifitas. Parsons melihat aktor ini sebagai termotivisir untuk mencapai tujuan. 2). Tujuan (goal): tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. 3). Situasi: tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi. Hal-hal yang termasuk dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. 4). Standar-standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatif: ini adalah skema tindakan yang paling penting menurut Parsons. Guna mencapai tujuan, aktor harus memenuhi sejumlah standar atau aturan yang berlaku.[28]

Pada dasarnya empat masalah fungsional ini membentuk dasar dari spesifikasi yang terperinci mengenai fungsi penting untuk keberlangsungan (*survival*) dari setiap sistem sosial. Menurut keberlangsungan merupakan fungsi utama seluruh masyarakat yang melibatkan pembelajaran terhadap segala sesuatu yang mengikat anggota masyarakat untuk bersatu melalui bahasa serta nilai – nilai sosial dan budaya. Parsons mengumpulkan empat paradigma fungsi yang disebut "*four function paradigm*" atau skema agil yang digambarkan sebagai berikut:

Adaptation (A)	Goal Attainment (G)
Latency (L)	Integration (I)

Gambar 1. Skema fungsi AGIL

Parsons mengaplikasikan model konseptual ini terhadap pengembangan dari disiplin ilmu yang luas mulai dari ekonomi, kesehatan mental, politik, sistem kepribadian, dinamika kelompok, sosialisasi, pendidikan, agama, hukum, organisasi, dan lain – lain. Berdasarkan hasil – hasil pengembangan skema AGIL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa empat masalah fungsional utama dalam keberlangsungan sistem yaitu,

[28] Fatmasari, "Ilmu dan Paradigma" (21 Agustus 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem yang berada pada tingkatan sistem kepribadian, sosial, dan budaya.[29]

Model AGIL merupakan koreksi dari teori sistem-sistem yang dikembangkan Parsons dan *The Social System* dan *Toward a General Theory of Action*. Dalam buku yang ia susun bersama muridnya, Neil Smelser, berjudul *Ekonomy dan Society* (1956), Parsons mengatakan bahwa masyarakat tersusun dari empat subsistem yang berbeda, yang masing-masing subsistem mempunyai fungsi untuk memecahkan persoalan tertentu. Subsistem ini bisa mengambil bentuk lembaga tertentu, atau bisa juga kegiatan dan prosedur yang sifatnya cair. Dengan menggunakan model AGIL, Parsons berambisi untuk mengembangkan model yang dapat memberi penjelasan secara total menyeluruh atas setiap masyarakat di muka bumi ini. bahkan, ia mengklaim bahwa keempat subsistem ini harus ada dalam sebuah masyarakat atau subsistem jika masyarakat itu mau bertahan untuk waktu yang cukup panjang. Bila dijabarkan dalam bentuk diagram, keempat subsistem itu tampak seperti ini.

a. A (Adaptation) adalah cara sistem beradaptasi dengan dunia material dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan). Ekonomi teramat penting dalam subsistem ini.

[29] Cristin Haryati, " Hubungan Fungsi AGIL (Adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan sistem) Dengan Kesejahteraan keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana"(Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2009), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. G (Goal attainment) adalah pencapaian tujuan. Subsistem ini berurusan dengan hasil atau produk (*output*) dari sistem dan kepemimpinan. Politik menjadi panglima dari subsistem ini.

c. I (*Integration*) adalah penyatuan subsistem ini berkenaan dengan menjaga tatanan. Sistem hukum dan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang memperjuangkan tatanan sosial termasuk dalam kolompok ini.

d. L (*Latent pattern maintenance and tension management)* mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mempunyai arah panduan yang jelas dan gugus tujuan dari tindakan. Lembaga-lembaga yang ada dalam subsistem ini bertugas untuk memproduksi nilai-nilai budaya, menjaga solidaritas, dan menyosialisasikan nilai-nilai. Gereja, sekolah, dan keluarga termasuk dalam subsistem ini.

Adapun kritik terhadap model pendekatan AGIL ini adalah bahwa model ini dilihat terlalu statis dan deskriptif, meskipun Parsons dan Smelser menekankan pentingnya interaksi antarsel maupun perbedaannyaa. Mereka melihat bahwa subsistem-subsistem ini saling berinteraksi dengan cara mempertukarkan barang-barang yang mereka butuhkan. Masing-masing subsistem mempunyai media pertukaran umum (*generalized media of exchange*) yang mempermudah terjadinya transaksi, yaitu uang (A), kekuasaan (G), pengaruh (I), dan komitmen terhadap nilai (L).

Selain itu, perlu dicatat disini pandangan Parsons tentang media kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan bukanlah hak milik (*property*) individu, juga tidak dikaitkan dengan nominasi. Kekuasaan adalah hak milik sistem dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hal yang baik, sebab kekuasaan memampukan masyarakat untuk menyelesaikan beraneka macam tugasnya. Pandangan ini berlawanan dengan pandangan teori kritis tentang kekuasaan dan lebih mirip dengan pandangan Foucault yang melihat kekuasaan bersifat tersebar (*diffused*) dalam masyarakat.

Model AGIL merupakan kombinasi antara unsur-unsur atau kebutuhan-kebutuhan material dan budaya, jadi bisa dipikirkan sebagai sebuah model yang bersifat multidimensi. Namun, lagi-lagi tekanan utama Parsons terletak pada budaya (subsistem L) yang menetapkan tujuan-tujuan akhir yang harus dicapai masyarakat sekaligus menjamin kestabilan sistem. Oleh Parsons, model AGIL ini diberi nama model sistem pengaturan yang sibernetis (*cybernetic model of system regulation*) istilah yang dipinjam dari ranah biologi. Ide yang mau disampaikan di sini adalah bahwa budaya beroperasi merupakan sebuah sistem control. Analoginya seperti otak manusia yang menerima sedikit rangsang namun mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh.[30]

Parsons berpendapat bahwa dinamika masyarakat dan sehubungan dengan itu, terjadi karena adanya beberapa unsur yang berintegrasi satu sama lain. Unsur-unsur itu ialah: *Pertama*, orientasi manusia terhadap situasi yang melibatkan orang lain. *Kedua*, pelaku yang mengadakan kegiatan dalam masyarakat. *Ketiga*, kegiatan sebagai hasil orientasi dan pengolahan/pemikiran pelaku tentang suatu kegiatan merupakan realisasi dari

[30]Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori*, 59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi dan karenanya selalu bersifat fungsional, karena bertujuan mewujudkan suatu kebutuhan, dan yang ke*empat*, lambang dan sistem perlambangan yang mewujudkan komunikasi tentang tentang bagaimana manusia ingin mencapai tujuannya.

Sehubungan dengan ini, maka suatu sistem sosial merupakan interaksi unsur tersebut oleh sejumlah individu hal mana terjadi dalam lingkungan fisik dan sosial atau ruang. Masing-masing individu dimotivasi oleh keinginan untuk mewujudkan tujuannya sebaik mungkin dalam situasi yang bersangkutan. Tujuan dan hasrat ini disampaikan antara lain melalui kegiatan komunikasi yang terjadi dalam suatu struktur kebudayaan dan perlambangan. Motivasi ini dapat besifat pribadi, dapat didasarkan pada dorongan kelompok, dan bersifat rasional dan dapat bersifat emosional. Disamping nilai pribadi, dikenal juga nilai sosial yang istilah ilmiahnya lebih dikenal sebagai *social-reference* karena dihayati bersama oleh anggota suatu kelompok sosial tertentu.[31]

Dalam hubungan ini kegiatan oleh pelaku individu dapat lebih dititik beratkan pada nilai pribadi atau referensi sosialnya, hal mana lebih dikenal dengan orientasi individu yang cenderung mementingkan kepentingan dan ikatan oleh lingkungan (penilaian positif terhadap dirinya). Seberapa jauh suatu kegiatan atau motivasi dan karenanya nilai sosial merupakan hasil interaksi antar individu dengan masing-masing sistem nilai pribadinya. Karena itu Parsons juga megenal pembagian nilai yang lebih bersifat

[31] Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universalistic dan partikularistik. Nilai yang bersifat partikularistik lebih menitikberatkan kebutuhan individu atau kelompok kecil sedangkan nilai universalistik lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat banyak yang memperhatikan apa yang diharapkan masyarakat dari pada anggota masyarakatnya. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa seberapa kuat sikap universalistik atau partikularistik pada orientasi individu, ditentukan oleh keterikatan (*effectifity)* individu dengan lingkungannya. Hal ini ditentukan lagi oleh seberapa jauh lingkungan itu sendiri memenuhi harapan dan kepentingan individu dan seberapa jauh individu berperan atau diakui oleh lingkungannya.[32]

3. Fungsi Teori AGIL

a. Fungsi adaptasi

Fungsi adaptasi mengacu pada perolehan sumberdaya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, kemudian mendistribusinya dalam sistem. Adaptasi adalah suatu pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial ekomoni, serta ekologi dimana penduduk tersebut tinggal. Pemilihan tindakan yang bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungan guna mengatasi tekanan – tekanan sosial ekonomi.

Tindakan adaptasi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang eksternal atau internal. Berdasarkan sudut pandang internal,

[32]Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi*, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adaptasi dibagi dua yaitu eksistensi interptretasi (*existential interpretation*) dan kategorisasi moral-evaluasi (*moral-evaluation categorization*). Tindakan eksistensi interpretasi adalah kemampuan seseorang untuk memandang dirinya agar tetap eksis dalam lingkungannya, sedangkan tindakan moral-evaluasi merupakan tindakan sesorang untuk tetap dapat mengikuti kaidah atau nilai – nilai moral yang ada di lingkungan. Berdasarkan sudut pandang eksternal, tindakan adaptasi seseorang dibagi menjadi dua yaitu simbolis kognitif (*cognitive symbolization*) dan simbolisasi ekspresif (*expressive symbolization*). Tindakan kognitif merupakan cara berpikir seseorang dengan memandang berbagai sumberdaya yang ada di lingkungan luar untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada.

b. Fungsi pencapaian tujuan (Goal Attainment)

Pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotifasi dan memobilitasi usaha dan energy dalam sistem untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan berdasarkan kualitas dapat diukur dari nilai yang didapat dari pencapaian tujuan, biasanya berupa kepuasan dan penghargaan terhadap sesuatu yang telah dicapai. Pencapaian tujuan berdasarkan performance dapat diukur berdasarkan suatu hal yang dapat ditunjukkan dalam tindakan.[33]

[33]Cristin Haryati, “ Hubungan Fungsi AGIL..”, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fungsi integrasi

Integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dengan melibatkan elemen untuk dapat mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem. [34]

d. Fungsi pemeliharaan sitem (*Latency*)

Pemeliharaan sitem (*Latency*) mengacu kepada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolahan masalah atau ketegangan. Secara umum, masalah pemeliharaan sistem dibagi menjadi tiga aspek yaitu pembagian peran masing – masing anggota, bantuan yang diterima untuk memotivasi anggota, dan peraturan atau norma yang berlaku.[35]

[34] Cristin Haryati, " Hubungan Fungsi AGIL..", 26
[35] Ibid., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id